

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI

Imelda Inka Octavia, Dewi Suprobowati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra Surabaya

imeldaoct102000@gmail.com¹ · dewisuprobowati@uwp.ac.id²

Abstrak

Implementasi sistem informasi desa di desa kepatihan yaitu mengimplementasikan sistem informasi desa di Desa kepatihan dari pengimplementasian itu desa kepatihan bisa meningkatkan kinerja pegawai dan menguntungkan bagi masyarakat dalam keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi sistem informasi desa di desa kepatihan kecamatan menganti kabupaten gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang di tentunya ikut terlibat dalam sistem informasi desa. Hasil penelitian terdiri dari empat aspek yaitu: 1) Komunikasi Kurang sesuai khususnya sosialisasi kepada masyarakat belum optimal dalam menggunakan sistem informasi desa sepenuhnya terutama dibagian layanan mandiri, 2) Sumberdaya sudah sesuai memiliki peningkatan kinerja khususnya dalam pelayanan dan untuk mengoperasikan sistem informasi desa, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai, 3) Struktur Birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, 4) Disposisi sudah sesuai dengan adanya dukungan dari kepala desa beserta masyarakat. Adapun faktor pendukung yaitu struktur birokrasi sudah berjalan sesuai aturan, kinerja pegawai meningkat terutama dibagian pelayanan, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai, dan disposisi mendapatkan dukungan dari kepala desa dan masyarakat, faktor penghambat yaitu komunikasi sudah berjalan meskipun belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Desa, Kinerja

Abstract

The implementation of the village information system in the village kepatihan is the implementation of the village information system in the village kepatihan from the implementation of the village kepatihan can improve employee performance and benefit the community in information disclosure. This study aims to determine the implementation of the village information system in the village kepatihan sub-district menganti gresik district. The type of research used is qualitative research methods. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Informants in this study consisted of 10 (ten) people who were certainly involved in the village information system. The results of the study consisted of four aspects, namely 1) Communication is less appropriate, especially socialisation to the community is not optimal in using the village information system fully, especially in the self-service section, 2) Resources are appropriate to have improved performance, especially in services and to operate the village information system, the facilities and infrastructure used are adequate, 3) Bureaucratic structure consists of SOPs and fragmentation has been implemented in accordance with the applicable regulations, 4) Disposition is in accordance with the support of the village head and the community. The supporting factors are that the bureaucratic structure has been implemented according to the rules, the performance of the staff has improved, especially in the service sector, the facilities and infrastructure used are adequate, and the disposition has the support of the village head and the community.

Keywords: Implementation, Village Information System, Performance

Pendahuluan

Fungsi utama pemda diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, pemda memutuskan dalam meningkatkan kecepatan terwujudnya kesejahteraan warga akan dilakukan melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan warga serta partisipasi warga. Pemerintah desa dituntut untuk membuat sistem informasi desa bagi masyarakat, memanfaatkan kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah keadaan desa atau masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Diharapkan dalam pembangunan desa dapat diketahui pentingnya komunikasi dan pemberitaan. Sistem informasi desa sangat penting untuk pertumbuhan daerah pedesaan dan desa. Pengelolaan dan penggunaan data desa yang diatur dalam Pasal 86 UU Desa didukung oleh sistem informasi desa, yaitu perangkat dan proses perangkat lunak digital berbasis web yang mencakup fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa. Adanya teknologi semakin maju pemerintah Desa Menganti menciptakan desa cerdas melalui konsep yang diterapkan di situasi saat ini yaitu mengharuskan melakukan perubahan yang sinkron dengan perkembangan zaman, seperti menggunakan teknologi menjadi inovasi.

Pemerintah desa Indonesia harus mengadopsi sistem informasi desa untuk menyampaikan berita yang tepat waktu dan akurat. Lebih dari motivasi top-down diperlukan agar sistem informasi desa menjadi relevan dan bermanfaat bagi masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan Sistem informasi Desa yang efektif tentunya bermula bahwa Sistem informasi Desa turut membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan diimplementasikan masyarakat itu sendiri. Urgensi dari penelitian ini yaitu banyak permasalahan yang dihadapi sebelum sistem informasi desa diterapkan. Informasi tidak tersampaikan secara rinci kepada masyarakat, pelayanan secara manual membuat pengantrian panjang dan membuat proses pelayanannya lama. Dengan mewujudkan tata kelola administrasi dan data yang baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyelenggarakan program Launching Sistem informasi Desa (SID), di Pendopo Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Kamis (31/3/2022). Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, didampingi Asisten Admin, Camat Menganti, Danramil ikut hadir pada kegiatan ini. kegiatan launching Sistem informasi Desa (SID) dilakukan diskusi dengan warga dan kades beserta perangkat desa se-Kecamatan Menganti.

Sistem Informasi Desa ini mampu meningkatkan kinerja pegawai secara cepat dalam melayani masyarakat, memberikan informasi hanya melalui platform yang secara cepat tersebar kepada masyarakat karena menggunakan digital dan mampu memberikan informasi terkait apapun yang membuat masyarakat mengetahui tanpa harus menanyakan ke kantor desa langsung. Dengan itu akan mempermudah segala pekerjaan pegawai kantor desa dan menguntungkan bagi masyarakat karena pelayanannya yang cepat. Membangun sistem informasi desa membutuhkan kesiapan SDM. Jika sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Desa tidak siap atau memiliki kapasitas yang tidak mencukupi, maka kebijakan atau pilihan desa yang mendukung Sistem Informasi Desa saja tidak relevan. Kemampuan yang dibutuhkan oleh Pengurus dan Pengelola Sistem di Sistem Informasi Desa antara lain mengetahui cara menginstal atau menghapus perangkat lunak komputer, mengetahui cara menggunakan web browser, mengetahui cara menghidupkan dan mematikan

komputer, dan mengetahui cara menjalankan program atau perangkat lunak yang telah diinstal di komputer.

Tinjauan Pustaka

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Secara umum, implementasi artinya tindakan atau pelaksanaan sebuah planning yang sudah disusun dengan matang, cermat serta jelas. Jadi, implementasi dilakukan jika telah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah planning yang sudah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga terdapat kepastian serta kejelasan akan planning tersebut. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Yaitu suatu aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan. Indikator implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Menurut (Prehanto, 2020) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Konsep Sistem Informasi mengemukakan bahwa “Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama guna memudahkan aliran informasi, energi atau materi dalam mencapai tujuan”. Menurut (Febriantoro & Suaidah, 2021) Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari urutan dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU Desa menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Desa Pasal 86, Sistem Informasi Desa merupakan kumpulan perangkat yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa. Sebagaimana dijelaskan di PERBUP Gresik Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, yaitu Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota bertanggung jawab atas sistem informasi pedesaan, dan mereka harus mengidentifikasi data yang mereka kelola sebagai data terbuka. Tujuan dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID) adalah memetakan potensi dan status desa (menggunakan informasi yang terkini dan terpercaya) Standar pelayanan rumah tangga harus ditingkatkan dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah desa. Aplikasi Sistem Informasi Desa dimanfaatkan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan tata desa.

Kinerja adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu organisasi atau perusahaan, semakin tinggi kinerja pegawai maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi (Kusjono & Ratnasari, 2019). Kinerja menurut Kasmir (2019:182) adalah hasil akhir dari tenaga dan kegiatan yang dicapai dengan melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Teori Kasmir (2019: 208-209) Mencantumkan banyak metrik kinerja, antara lain: Melihat mutu (quality) pekerjaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu dapat digunakan untuk mengukur mutu (quality) dalam kinerja.

Metode

Penelitian ini memakai jenis penelitian metode kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan di filsafat postpositivisme, dipergunakan buat meneliti di kondisi obyek alamiah, dimana peneliti ialah menjadi instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan akibat penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di DesaKepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61174, Jl. Raya Kepatihan No. 35. Pemukiman Kepatihan adalah sebuah pemukiman di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “implementasi sistem informasi desa kepatihan”. Untuk mendapatkan data penelitian akan menggunakan dua dimensi penelitian yaitu :

Tabel 1 Fokus dan Indikator Dimensi

Fokus Penelitian	Dimensi Penelitian	Indikator Dimensi
Implementasi Sistem Informasi Desa Kepatihan	Implementasi kebijakan sistem informasi desa (George C. Edwards III)	Komunikasi
		Sumber Daya
		Struktur Birokrasi
		Disposisi
	Faktor yang mempengaruhi sistem informasi desa	Faktor Pendukung
		Faktor Penghambat

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Sumber informasi utama adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan partisipan studi yang dipilih berdasarkan kedekatannya dengan Implementasi Sistem Informasi Desa. Berikut daftar informan :

Tabel 2 Informan

No	Uraian	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang

3.	Operator Sistem Informasi Desa	1 Orang
4.	Kasi Pemerintahan	1 Orang
5.	Kasi Pelayanan	1 Orang
6.	Masyarakat	5 Orang
	Jumlah	10 Orang

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

a. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan analisis masalah penelitian dikenal sebagai data sekunder. mengambil bentuk publikasi yang dikeluarkan pemerintah, literatur, dan undang-undang yang membahas masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu :

a. wawancara

Artinya pertemuan 2 orang buat bertukar informasi serta inspirasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna pada suatu topik tertentu (Suyigono, 2019). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

b. Observasi

Salah satu teknik yang bisa dipergunakan buat mengetahui atau menelaah tingkah laku non verbal yakni menggunakan menggunakan teknik observasi. Observasi juga tidak terbatas di orang, namun juga objek-objek alam yang lain. Dalam (Suyigono, 2019) juga menyatakan observasi merupakan dasar seluruh ilmu pengetahuan, data itu dikumpulkan bantuan berbagai alat sehingga fokus di penelitian akan tergambar dengan jelas.

c. Untuk mendapatkan data sekunder melalui tulisan, rekaman percakapan, artikel, foto dan berita. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti dari wawancara dan hasil dari observasi.

Kegiatan pada analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan serta pembuktian, yang dianggap dengan Analisis data, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi) dalam penelitian kualitatif.

b. Reduksi Data

Sugiyono (2019) menegaskan bahwa karena jumlah data yang dikumpulkan di lapangan cukup signifikan, maka harus didokumentasikan dengan cermat dan mendalam. Seperti yang telah disebutkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, semakin kompleks dan luas datanya, sehingga diperlukan reduksi data untuk analisis data.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk ringkasan, grafik, hubungan antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dengan menyediakan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur kegiatan selanjutnya sesuai dengan apa yang telah diketahui (Suyigono, 2019).

d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Hasil pertama yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah, menurut Suyigono (2019). Temuan yang dicapai adalah: kesimpulan yang kredibel jika tidak ada bukti pendukung yang kuat terlebih dahulu, didukung oleh bukti yang andal dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Keabsahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang merupakan penelitian ilmiah dan berfungsi untuk memverifikasi data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. pada Penelitian ini, peneliti memakai teknik triangulasi sumber (data). buat menguji kredibilitas data dilakukan menggunakan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber.

Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan teori George C. Edward III (1980), kepatihan menerapkan sistem informasi desa yang memperhatikan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari Produsen kebijakan di pelaksana kebijakan yang nantinya informasi tadi akan disampaikan di grup sasaran buat mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait.

b. Sumber Daya

Dalam rangka penerapan sistem informasi desa berbasis web di desa kepatihan dipilih sumber daya sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karena warga juga membutuhkan informasi yang mudah diakses maka dibuatlah sistem informasi desa kepatihan untuk memudahkan warga dalam menerima informasi dan mempekerjakan pegawai.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi sistem informasi desa didesa kepatihan terdapat 2 karakteristik utama yaitu: SOP (standar operasional prosedur) dan Fragmentasi :

1. SOP

SOP (standard operational procedure) mekanisme-mekanisme dasar kerja adalah salah satu struktur dasar berasal suatu organisasi. memakai SOP para pelaksana mampu memanfaatkan waktu yang tersedia , selain itu SOP juga menyeragami tindakan-tindakan dari pejabat di organisasi-organisasi yang kompleks serta tersebar luas yang di gilirannya bisa menyebabkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar pada penerapan peraturan-peraturan.

2. Fragmentasi

Frgmentasi adalah komponen kunci dari implementasi yang efektif karena memerlukan koordinasi yang lebih luas, semakin banyak tugas yang tersebar di

beberapa entitas. Tanpa hal ini, maka miskonsepsi justru akan terjadi dan mengancam keberhasilan implementasi. Di sisi lain, jika tugas tersebut dilakukan oleh satu entitas, akan mudah baginya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

d. Disposisi

Disposisi atau perilaku dari pelaksana bisa mempengaruhi taraf keberhasilan implementasi suatu program. Jika pelaksana sepakat menggunakan isi serta maksud kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan suka hati. Penelitian tersebut telah menunjukkan kepribadian atau perilaku dari mereka yang menerapkan sistem informasi desa.

Salah satu aspek pendukung sistem informasi desa program ini di desa kepatihan adalah dukungan masyarakat juga diperhitungkan. Warga mengantisipasi bahwa pemerintah desa akan mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Keberhasilan gagasan program ini bergantung pada tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini baru 50% selesai. Sulitnya mencari sarana dan prasarana untuk mendukung sistem informasi desa karena program ini membutuhkan dana dan data masyarakat yang cukup besar untuk dilaksanakan.

Interpretasi Penelitian (Pembahasan) yaitu Komponen penting untuk mempraktekkan UU Desa adalah Sistem Informasi Desa (SID). Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota, sesuai dengan pasal 3 UU Desa pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan daerah perdesaan. Mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu pada PERBUP Gresik nomor 23 Tahun 2021.

Tabel 3 Interpretasi Desa Kepatihan

No	Indikator	Desa Kepatihan
1.	Komunikasi	Kurang sesuai karena dilain desa sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penggunaan sistem informasi desa namun masyarakat belum menggunakan sistem informasi desa sepenuhnya terutama dibagian layanan mandiri.
2.	Sumber Daya	Sudah sesuai terutama sumberdaya manusianya yaitu perangkat desa memiliki peningkatan kinerja khususnya dalam pelayanan dan untuk mengoperasikan sistem informasi desa diberikan arahan dari kecamatan terkait peningkatan sistem informasi desa itu ada pertemuan dan untuk sarana prasarana sudah menggunakan fasilitas yang memadai
3.	Struktur Birokrasi	Sudah sesuai karena desa kepatihan memiliki 2 petugas operator sistem informasi desa yang dipegang oleh kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan sesuai dengan keputusan dari kepala desa kepatihan
4.	Disposisi	Sudah sesuai karena operator sistem informasi desa sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan dibantu pegawai kantor desa yang lainnya sesuai tugas masing-masing dan mendapatkan arahan dari kepala desa.
5.	Faktor Pendukung	Seluruh informasi dapat diakses masyarakat melalui website sistem informasi desa dan desa kepatihan ingin meningkat pelayanan dengan pembuatan seperti mesin

		ATM untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat.
6.	Faktor Penghambat	penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif serta kurangnya pelatihan khusus dari pusat untuk sdm nya

Sumber : Berdasarkan Hasil Penelitian Lapangan (2023)

Penutup

Dapat disimpulkan dari temuan penelitian “Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Desa Kepatihan Kecamatan Menganti” yaitu : Penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum efektif untuk kejelasan, namun komunikasi dalam implementasi Sistem Informasi Desa Kepatihan sudah berjalan meskipun masih perlu ditingkatkan karena beberapa layanan masih belum sepenuhnya dapat diakses oleh warga. Struktur Birokrasi SOP pengaturan pada bagian ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang secara jelas menyatakan bahwa desa berhak mengakses berita melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, merupakan landasannya. Untuk struktur birokrasi yang digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kepatihan Desa. Menurut PERBUP Gresik Nomor 23 Tahun 2021 penjelasan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembagian tugas masing-masing telah menghasilkan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Teruntuk SDM Kepala Desa yang telah diberi pengarahan oleh koordinator kecamatan tentang cara menjalankan sistem informasi desa bertanggung jawab atas sumber daya manusia yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi desa di desa kepatihan. Sarana dan prasarana sudah memadai baik dari segi sarana ataupun prasarana yang digunakan. Disposisi terhadap implementasi sistem informasi desa kepatihan sudah efektif sebab kepala desa sangat mendukung adanya sistem informasi desa ini serta ikut mengawasi perkembangan sistem informasi desa di kepatihan.

Faktor Pendukung Sistem informasi desa kepatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor desa yaitu sudah sesuai SOP PERBUP Gresik No. 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya sistem tersebut. Itu telah beroperasi sesuai dengan bagaimana tugas masing-masing telah didistribusikan, dan sebagai hasilnya, kinerja staf meningkat. Infrastruktur dan fasilitas telah beroperasi secara efisien.

Faktor Penghambat Sistem Informasi Desa Kepatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor desa yaitu Ketidakmampuan pemerintah desa dalam mendistribusikan informasi secara jelas dan efektif menjadi kendala penerapan sistem informasi desa. Pasalnya, sejumlah layanan masih belum sepenuhnya tersedia bagi masyarakat. Sistem informasi desa kepatihan belum mencantumkan transparansi keuangan karena diklaim bersifat sensitif. Kurangnya pelatihan khusus teruntuk sumber daya manusia dari perangkat desa oleh pemerintahan kabupaten Gresik. Karena perangkat desa hanya mengikuti arahan yang diberikan pihak kecamatan terkait himbauan perihal Sistem Informasi Desa.

Daftar Pustaka

- Aisyah, B. H. (2022). Komunikasi Interpersonal Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Digitalisasi Desa Di Desa surodikraman Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 59-63.
- Andarista, O., & Jatiningsih, O. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan APBDes Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Website D Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Jurnal Kajian moral dan kewarganegaraan*, 06, 9-12.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980.
- Febriantoro, D., & Suaidah. (2021). Perancangan Sistem Informasi Desa Pada Kecamatan Sendang Agung Menggunakan Extreme Programming. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*.
- Fitri, R., Subandi, S., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bamban Selatan Dalam Membangun Desa. *Jurnal Implementation and Action*.
- Hanafi, H. (2021). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Relevan*, 7-8.
- Hildayanti, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. *Skripsi*, 71-79.
- Isnaini, S. R., Hikmah, N., & Asrori, T. (2022). Sistem Informasi Desa Berbasis Web Di Desa Sumpersuko. *Jurnal Informatika dan Elektro*, 01, 14-17.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusjono, & Ratnasari. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sumber Tenaga Lestari (Citylight Apartement). *Jurnal Ilmiah*, 02, 40-43

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation And Public Policy*. Bandung: Scott, Foresmen.
- M.Si, D. H. (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan reklame*. Surabaya: CV.Jakad Publishing Surabaya.
- Mugi, P., Eko, N. D., & Iqbal, A. (2021). Pelatihan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *Abdimas, 04*, 4-7.
- Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Jurnal Teknokom, 04*, 10-12.
- Muthmania. (2019). Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang. *Skripsi*, 59-64.
- Novan, M., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 01*, 8-10.
- Prehanto, D. R. (2020). *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Scopindo Media Pustaka.
- susanto, a., rahmawanto, e. h., mulyono, i. u., & sari, c. a. (2021). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Peningkatan Layanan dan Keterbukaan Informasi di DesaHulosobo, kaligesing, purworejo. *Abdimasku, 4*, 38-47.
- Suyigono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Wijaya, D. W., & Fauji, D. A. (2020). Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk. *jurnal of law, administrasion, and social Sien, 01*, 51-55
- PERBUP Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Sistem Informasi Desa - Panda*. (t.thn.). Diambil kembali dari Panda.id: <https://www.panda.id/sistem-informasi-desi-sid-2/#:~:text=Pasal%2086%2C%20Bagian%20Ketiga%20adalah,Desa%20dan%20pembangunan%20Kawasan%20Perdesaan>.
- Sistem Informasi Desa Kepatihan Kecamatan Menganti*. (t.thn.). Diambil kembali dari Pemerintahan Kabupaten Gresik: <https://desakepatihan.gresikkab.go.id/>

